

Noblesse Oblige! Membangun Semangat Zaman, Menuju Kebangkitan Ekonomi Negeri: Konteks Indonesia

ABSTRACT

In this early of 21st century, Indonesians are currently facing weighty challenges. The social contract between the citizens and the government that was made during the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia is now under a threat such as bleak economy caused by poverty and social problems. There is no other way to escape from the threat but to forestall by implementing integrated economic development plans nationally. The implementation of the economic plans aforementioned would not possibly be detached of the roles of human beings as human capital and man of culture that are involved directly in the process of developing and re-building the Indonesia nation. In relation to this matter, this paper discusses one part of the cultural dimension, i.e. ethos or characters possessed by a group of people and used as their foundation to work. In "re-building" the country, Indonesians are in need of a group of agents of development who can revive the new and better soul of age (zeitgeist) in this Reform era. The zeitgeist can only appear if those agents are familiar with ethos upheld by the former ones, that is Noblesse Oblige, which means that inside the specialty, power and authority are inherent with responsibility to the people. Therefore, the agents are the people who have important roles and positions in re-building the economy of Indonesia in pursue of the realization of the nation-state aspiration to become a truly developed, harmonious, and free nation.

Key word: economic crisis, to re-build the social contract among the citizens, positions and roles of the statesmen, and aspirations of Indonesian people in economy and politics.



Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. adalah Gubernur BI (Bank Indonesia) di Jakarta periode 2003-2008; dan anggota MWA (Majelis Wali Amanah) UPI di Bandung. Lahir di Garut, Jawa Barat, pada tahun 1947. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Ir.) di Fakultas Pertanian UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung tahun 1974; Master of Arts (M.A.) di bidang ekonomi dari Michigan State University, Amerika Serikat, tahun 1984; dan Doktor (*Honoris Causa*) di bidang ekonomi dari UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang, Jawa Tengah, tahun 2006, dan UNPAD Bandung, tahun 2007. Menulis buku, di antaranya adalah

Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Untuk keperluan akademik, beliau dapat dihubungi dengan alamat kantor: Gubernur Bank Indonesia, Gedung Sjafruddin Prawiranegara Lt.3 Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

PENGANTAR

Bangsa Indonesia di awal abad ke-21 ini tengah berhadapan dengan sebuah tantangan yang tidak ringan. Kontrak sosial yang membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang berhadapan langsung dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi sebagai realita objektif yang menggugatnya. Untuk mengatasi tantangan ini, tidak ada jalan lain kecuali mendinamiskan kembali derap laju pembangunan ekonomi nasional. Upaya dinamisasi pembangunan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur manusia sebagai makhluk budaya yang terlibat langsung dalam kerja “membangun” kembali negerinya.

Dengan latar belakang itu, tulisan ini berbicara tentang satu bagian dari dimensi budaya tersebut, yaitu etos atau karakter yang dimiliki sekelompok manusia yang menjadi landasan mereka dalam bekerja. Sebuah garis pandang akan saya uraikan dalam tulisan ini, yaitu bahwa untuk “membangun” kembali negerinya, bangsa Indonesia memerlukan sekelompok pejuang pembangunan yang dengan bersemangat membangkitkan ruh zaman (*zeitgeist*) baru yang lebih baik di era Reformasi ini. Ruh zaman itu hanya dapat muncul jika pejuang-pejuang tersebut akrab dengan etos yang diusung oleh para pendahulunya, yaitu *Noblesse Oblige*, atau yang secara longgar berarti: didalam keistimewaan, kekuatan dan kekuasaan melekat sebuah tanggungjawab pada masyarakat.

MENGKALI HIKMAH DARI MASA LALU

Dalam sebuah tulisannya, Frances Gouda (1995), seorang sejarawan Belanda dari *Universiteit van Amsterdam*, bercerita tentang anjungan Hindia Belanda, sebagai anjungan termegah, terbesar dan paling multikultural pada Festival Kolonial se-Dunia di *Bois de Vincennes*, Paris pada tahun 1931. Tulisan itu merekam potret menarik tentang psikologi hubungan antara bangsa penguasa dan bangsa yang dikuasai.

Bagi kerajaan Belanda, anjungan itu adalah simbol keberhasilan pemerintah kolonial dalam membangun kesatuan politik dari berbagai budaya, etnis dan agama yang tumbuh subur di kepulauan Nusantara. Mengutip surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* (8 Mei 1931), Frances Gouda menggambarkan bahwa pada festival itu anjungan Hindia Belanda di *Bois de Vincennes* adalah simbol “keseimbangan, ketentraman dan keseriusan yang menjadi ciri penting identitas kolonial kerajaan Belanda”. Itulah psikologi mantan

tuan-tuan kolonial kita. Hindia Belanda, sejak Politik Etis pada tahun 1901 dicitrakan di dunia internasional sebagai surga bagi rakyat koloni dan sebuah suri tauladan bagi kolonialis lainnya. Gugatan Conrad Théodoor van Deventer, sang pendukung Politik Etis, pada 3 dekade sebelumnya bahwa kerajaan Belanda punya sebuah hutang kehormatan, *a debt of honour*, pada rakyat koloni terjawab sudah. Hutang itu di tahun 1931 telah lunas sebagaimana yang tercermin pada *het tropen paleis* di *Bois de Vincennes*.

Tapi tidak demikian kenyataan yang dirasa oleh rakyat koloni waktu itu. Keseharian rakyat Hindia adalah pertarungan antara keistimewaan dan pembatasan. Keistimewaan bagi tuan-tuan kolonial, namun pembatasan-pembatasan yang diskriminatif bagi kaum pribumi, baik secara individu maupun kolektif, dalam menggapai kemakmuran dan mengembangkan potensinya secara bebas dan mandiri. Kita mengenal fenomena ini sebagai terbatasnya hak untuk menentukan nasib sendiri, *a denial to the right to self determination*. Hal yang lebih menyayat hati adalah bahwa semua pembatasan itu diiringi pula oleh eksploitasi ekonomi yang diorganisasi oleh negara. Sebagai salah satu pegawai perkebunan, Tan Malaka muda bercerita tentang buruh-buruh kontrak perkebunan Belanda di daerah Sumatera Timur (sekarang Utara) pada tahun 1920-an, yang hidup dibawah level subsisten, sementara kerajaan Belanda menikmati laba yang luar biasa besarnya (Poeze, 1988).

Namun dibalik realita pedih tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sekelompok orang-orang di Hindia, yaitu anak-anak muda yang memperoleh keistimewaan dari kebijakan Politik Etis di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keistimewaan itu berupa pintu yang dibuka bagi mereka untuk memperoleh pendidikan menengah dan tinggi, baik di Hindia maupun di Holland. Jika kemudian kita peras lagi sekelompok anak muda tersebut maka mereka pun terbagi dua lagi. Satu kelompok memilih menjadi pegawai birokrasi (*ambtenaar*), *mandor*, atau *klerk* di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan kolonial. Sementara itu, satu kelompok lagi memilih jalan hidup yang berbeda: sebuah jalan hidup yang penuh pendakian, yang keluar dari *comfort zone*, untuk menjadikan manusia di sekelilingnya mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan terbebas dari pembatasan-pembatasan dan penindasan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Anak-anak muda dari golongan kedua ini, seperti juga para tokoh *The Federalist Papers*, Alexander Hamilton dan James Madison di Amerika Serikat, serta barisan *Young Turks* di era Ottoman akhir,

berniat mencabut paku-paku pembatasan yang membelenggu saudara-saudara sebangsanya. Kita mengenal kelompok kedua ini dalam catatan sejarah sebagai anak-anak muda pendiri *Indische Vereeniging* (Rivai, 2000; dan Kartodirdjo, 2005). Anak-anak muda Hindia Belanda dari kelompok kedua ini, selain berani dalam *praxis* dan mempunyai kekuatan intelektual dalam *idea*, juga memendam etos *Noblesse Oblige* dalam diri mereka seperti dalam novel Honoré de Balzac, *the Lily of the Valley* (Wormeley, 2002). Etos itu muncul sebagai pandangan hidup yang meyakini bahwa keistimewaan yang mereka peroleh dari Politik Etis adalah sebuah keistimewaan yang membawa tanggungjawab bagi kemaslahatan manusia lainnya. Karena itu, merekalah yang tercatat dengan tinta emas sejarah sebagai sebuah generasi yang mensyukuri nikmat. Etos generasi mereka pulalah yang kemudian diperkenankan oleh Sang Pemilik Keagungan untuk menorehkan noktah besar dalam sejarah peradaban umat manusia melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 sebagai *the Spirit of Bandung Generation*.

Kemerdekaan dan kedaulatan yang diawali oleh perjuangan anak-anak muda Hindia yang progresif di awal abad ke-20 tersebut telah pula memberi kita hak yang tak dapat diganggu gugat untuk menentukan jalan hidup kita sendiri, *an undeniable right to self determination*, termasuk hak untuk menentukan nasib materiil kita sendiri, yaitu menggapai kesejahteraan kehidupan ekonomi secara mandiri tanpa pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh pihak lain.

MERENUNGKAN PERSOALAN BANGSA SAAT INI

Mengawali abad ke-21 ini, bangsa Indonesia dan para pemimpinnya dihadapkan pada persoalan yang sangat krusial, yaitu meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi jika dibandingkan era sebelum krisis ekonomi moneter tahun 1997. Ditengah pasokan tenaga kerja yang berlimpah (*unlimited supply of labor*), persoalan ini terasa sedang menggugat makna kontrak sosial yang dibentuk di tahun 1945. Mereka yang berada di papan bawah dari piramida sosial-ekonomi saat ini tentunya sedang merasa bahwa dunianya adalah dunia yang tidak terproteksi oleh kontrak sosial yang mereka masuki. Ada semacam ketidakamanan dan kecemasan pada diri mereka yang terabaikan, yang mungkin memunculkan pertanyaan dalam benak mereka: apakah dunia sudah terdiri dari manusia-manusia yang berwatak serigala?

Menyitir Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1660), individu akan merelakan sebagian dari kebebasannya untuk diambil oleh negara jika dengan itu ia akan terlindung dari suatu keadaan dimana manusia lain bisa saja menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, *homo homini lupus*. Dengan kata lain, melalui kontrak sosial, negara diharapkan dapat mencegah munculnya *state of nature* yang seperti itu.

Sang nobelis, Amartya Sen (2000), pernah menerangkan bahwa eksklusi sosial adalah hakekat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Ketika satu kelompok dalam masyarakat secara sistematis dipinggirkan secara sosial-ekonomi sehingga kelompok itu merasakan sebuah dahaga yang sangat mendalam untuk perbaikan hak-haknya atas kesejahteraan, atau yang oleh Amartya Sen disebut sebagai deprivasi sosial (*social deprivation*), maka pada titik itu kemiskinan sebagai sebuah entitas ontologis menjadi “ada”. Setarikan nafas dengan Amartya Sen, Robert Reich (2000), mantan *Secretary of Labor* dalam kabinet Bill Clinton, pernah memberi ilustrasi yang menarik tentang deprivasi sosial. Kira-kira begini kata-katanya:

Ketika kebanyakan orang berada di sisi tengah dari piramida, maka kemiskinan sebagai entitas ontologis memudar pamornya. Akan tetapi ketika piramida itu kemudian membesar dibawah, maka sebagian orang yang berada di sisi bawah dari piramida akan bertanya: mengapa kami berada disini? Ketegangan dan potensi konflik kemudian mencuat kepermukaan karena tentu saja mereka yang dibawah akan dengan sangat sengit membantah tuduhan Malthusian dari mereka yang berada di bagian atas piramida bahwa: persoalan kemiskinan adalah persoalan budaya “malas” dan “prokreatif” dari mereka yang miskin (Reich, 2000).

Bagi para buruh pabrik dan buruh tani, pekerja serabutan, tukang *kantau*, tukang gali, pedagang kecil dan semua saja yang berada di bagian bawah piramida sosial ekonomi, argumen budaya seperti itu adalah sebuah argumen yang *absurd*. Bagi mereka yang miskin, penjelasan yang paling masuk akal tentang jalan nasib mereka adalah tertutupnya akses (*deprivation*) untuk melakukan mobilitas sosial-ekonomi keatas. Ketertutupan itu menimbulkan kehausan akan pintu-pintu yang lebih terbuka. Logika ini membuat terbukanya akses bagi semua untuk menggapai kemakmuran secara mandiri adalah hakekat inklusi sosial. Oleh karena itu, membuka akses bagi mereka yang mengalami eksklusi sosial adalah sebaik-baik tujuan yang perlu menjadi pegangan pemangku kebijakan publik di suatu negara,

karena disana ada pemaknaan yang positif terhadap kontrak sosial. Disana ada penolakan terhadap pandangan bahwa di dunia ini *homo homini lupus*.

Kalau kita merenungkan kembali krisis ekonomi yang kita alami 10 tahun lalu, yang dampaknya bahkan masih kita rasakan saat ini, kita mempunyai cukup alasan untuk mengatakan bahwa krisis tersebut menimbulkan persoalan eksklusi sosial bagi kebanyakan manusia Indonesia. Eksklusi itu timbul karena terjadi redistribusi pendapatan dan tentunya kekuatan ekonomi-politik, secara tiba-tiba dalam perekonomian ketika krisis itu menghantam. Eksklusi tersebut pada kehidupan mereka yang sudah miskin dan mereka yang menjadi miskin karena krisis tidaklah teatrikal tapi sangat nyata. Hasil akhir dari redistribusi itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka yang berada di bagian bawah dari piramida.

Sementara itu, perekonomian paska krisis yang *inflation prone* dan sarat dengan rigiditas struktural yang membuat ia bertumbuh dibawah rata-rata pra-krisis, telah menyebabkan disparitas pendapatan yang semakin melebar, kualitas pembangunan manusia yang menurun dan informalitas tanpa proteksi sosial dalam pasar tenaga kerja yang meningkat. Kemampuan yang asimetris pada kedua kelompok dalam piramida sosial-ekonomi dalam menyikapi *shocks* dalam perekonomian, menyebabkan si miskin yang lemah menjadi semakin lemah, sementara si kaya yang memiliki banyak *cushion* dapat dengan mudah *safely sail-through the storm*. Kontras-kontras ini di ujungnya dapat menjadi *feed-back* yang negatif pada kesinambungan pembangunan ekonomi. Bangsa kita dapat saja masuk dalam jebakan kemiskinan (*poverty trap*), karena adanya efek menetes keatas (*a trickle up economy*) dalam perekonomian (Bank Indonesia, 2007). Kontras-kontras ini pula yang akan memberi pertanyaan pada kebijakan seperti apa yang etis untuk diambil oleh pemangku kebijakan ekonomi di negeri ini? Pertanyaan ini menyiratkan pentingnya untuk menggagas sebuah etos yang perlu untuk dimiliki oleh setiap pemangku kebijakan di seluruh negeri guna menghindari kejatuhan negara pada kondisi Hobbesian *state of nature*.

MEMAKNAI KEMBALI KONTRAK SOSIAL TAHUN 1945

Dalam proses menemukan etos tersebut ada satu yang pasti, yaitu bahwa para pemangku kebijakan di era Reformasi saat ini jangan sampai menjadi sekumpulan Monsieur Jourdain dalam komedi balet Molière (1670), *Le Bourgeois Gentilhomme*, yang semata mencari

pengakuan sebagai aristokrat-aristokrat baru tanpa membawa manfaat apa-apa bagi kemanusiaan.

Tapi lebih dari itu, terdapat hal lain yang sama pentingnya. Para pemangku kebijakan di seluruh negeri perlu berpikir bahwa gugatan Conrad Théodoor van Deventer harus pula ditujukan pada diri kita sebagai generasi penerus di negeri ini. Para pemangku kebijakan pastinya termasuk dalam mereka yang memperoleh keistimewaan sebagai generasi terdidik di negeri ini. Oleh karena itu, mereka yang menduduki jabatan publik memiliki hutang kehormatan, *a debt of honour*, pada generasi pendahulunya. Hutang kehormatan itu perlu dilunasi, dengan tidak menyalahgunakan anugerah hak penentuan nasib sendiri, termasuk hak penentuan nasib ekonomi sendiri, yang telah mereka perjuangkan.

Untuk membayar *debt of honour* tersebut, perlu untuk dikembangkan etos tanggungjawab kebangsaan seperti yang diusung oleh generasi terdahulu. Itu berarti pejabat publik sebagai generasi terdidik perlu menjadikan kemerdekaan serta kedaulatan yang kita warisi dari generasi pendahulu, mempunyai makna bagi seluruh anak negeri. Hanya diatas sikap dan etos seperti itulah seluruh komponen kontrak sosial yang melandasi terbentuknya negara-kebangsaan yang kita sepakati di tahun 1945 dapat bertahan. Dan kita tidak mempunyai kemewahan untuk tidak mempertahankannya, sebagai tanda bahwa kehidupan dan kebebasan yang kita punya saat ini adalah kehidupan dan kebebasan yang pantas untuk diperjuangkan oleh generasi terdahulu.

Sebagai seorang ekonom yang juga pemangku kebijakan publik, saya berpandangan bahwa agar kontrak sosial kita dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempunyai makna, maka perekonomian kita kedepan harus dibangun diatas sebuah etika pembangunan yang mengedepankan semangat bahwa yang kuat tidak boleh melukai yang lemah, apalagi jika yang lemah itu adalah saudara sebangsanya. Didalam kekuatan, kekuasaan dan *privilege* yang melekat pada setiap pemangku kebijakan melekat sebuah tanggung jawab: *Noblesse Oblige!* Setiap orang di bumi Indonesia ini mempunyai hak untuk tidak dizalimi hajat hidupnya, baik oleh negara, pemangku kebijakan di negerinya, para aparat pemerintahan, maupun oleh kekuatan-kekuatan lain. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi, yang merupakan persoalan-persoalan terbesar di era Reformasi ini, perlu menjadi *nemesis* sejarah bagi para pemangku kebijakan di era Reformasi. Oleh karena itu keberpihakan pada yang

lemah adalah sebuah keharusan. Kiranya para pemangku kebijakan di seluruh negeri perlu bersepakat dengan Bung Hatta, Wakil Presiden NKRI yang pertama (1945-1956), bahwa perekonomian kita jangan sampai dibangun di atas “feodalisme baru yang terbentuk dari kelompok-kelompok ekonomi dan kepentingan-kepentingan ... (neo feodalisme) seperti itu hanya melihat pada haknya dan bukan pada tanggungjawabnya pada masyarakat” (Yasni, 2002).

MASIH ADA HARAPAN

Seperti zaman *progressive era* di Amerika Serikat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Norton *et al.*, 2007), Reformasi di Indonesia di awal abad ke-21 ini telah pula memunculkan *enklave-enklave* perubahan positif di beberapa kabupaten dan provinsi. Perubahan-perubahan positif tersebut diusung oleh pemimpin-pemimpin lokal yang *visionary* dan ber-etos negarawan. Otoritas-otoritas lokal tersebut mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas dan melayani rakyatnya dengan sangat baik dengan sumber daya finansial yang sederhana jumlahnya (Bahagijo, 2007). Mereka tidak bergantung pada sumber daya finansial, karena mereka sadar bahwa implementasi budaya yang tepat dalam tata kelola pemerintahan adalah *sufficient condition* bagi pembangunan yang berkualitas dan perubahan sosial yang mengangkat martabat.

Walaupun jumlah mereka saat ini masih sedikit, mungkin tidak lebih dari hitungan jari, tapi merekalah pejuang-pejuang dalam membangun Indonesia baru yang lebih bermartabat. Merekalah kekuatan kultural yang positif di negeri ini. Adanya pioner-pioner ini tentu membesarkan hati kita dan memberi optimisme tentang munculnya kekuatan kultural bagi perubahan sosial yang maha dahsyat di negeri ini. Sebuah peluang untuk membentuk *critical mass* masyarakat berkeadaban (*civil society*) yang memajukan negerinya terbentang luas di hadapan kita. Setiap lembaga pemerintahan dan lembaga negara kiranya perlu mendukung lokalitas-lokalitas progresif tersebut dengan berbagai instrumen kebijakan yang mereka miliki. Kita perlu segera membuat lilin-lilin kecil itu menjadi obor besar yang menerangi sekelilingnya dan menggugah perubahan di lokalitas lainnya sehingga tercipta eksternalitas positif di seluruh negeri.

Bank Indonesia melihat harapan besar yang dapat muncul dari lokalitas-lokalitas progresif tersebut untuk mengatasi persoalan eksklusif sosial-ekonomi yang cukup dalam saat ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah melakukan reorientasi peran kantor-kantornya

di daerah agar *intangible asset* yang dimilikinya dapat lebih bermanfaat bagi bangsa, terutama bagi lokalitas-lokalitas yang progresif dan terdepan dari sisi *public governance*. Aset-aset *intangible* seperti kemampuan *advisory* para profesional di Bank Indonesia, kemampuan dalam memfasilitasi bantuan teknis untuk pemberdayaan ekonomi daerah, data-data, informasi, serta analisis yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia, semuanya berpotensi untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah. Bahkan tidak berlebihan bila mengatakan bahwa semakin jauh dari ibu kota negara, maka *marginal benefit* dari aset-aset *intangible* itu pada pembangunan nasional akan semakin berlipat. Jika aset-aset *intangible* ini kemudian dapat bermanfaat bagi *enklave-enklave* lokalitas progresif yang mulai bermunculan saat ini, maka bukan tidak mungkin kita dapat segera mencapai *critical mass civil society* yang memperjuangkan kebajikan ketatanegaraan (*civic virtue*). Pada titik itu, kita semua kemudian bisa meyakini bahwa penyelesaian masalah eksklusif sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran, sudah di depan mata.

PENUTUP

Dengan catatan akhir tadi saya ingin menutup tulisan dengan sebuah keyakinan bahwa kebangkitan ekonomi negeri mensyaratkan hanya satu hal saja, yaitu semangat *Noblesse Oblige* dari anak-anak negeri yang memiliki keistimewaan, *privilege* dan kekuasaan untuk menciptakan kebajikan dalam ruang publik kita dan mengusung inklusi sosial sebagai bagian dari *civic virtue*. Kiranya baik bagi kita semua untuk merenungkan kembali pesan yang telah lama disampaikan oleh Mahatma Gandhi, pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan negara India, sebagai berikut:

Whenever you are in doubt, try the following expedient: recall the face of the poorest and the most helpless man you have ever seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him.

Daftar Pustaka

Bahagijo, S. (2007). "A Few Good People and Local Government" dalam surat kabar *Jakarta Post*. Jakarta: 19 Juni.

- Bank Indonesia. (2007). "Outlook Perekonomian Indonesia, 2007–2011: Inflasi, Kemiskinan dan Penawaran Agregat di Perekonomian Indonesia". *Naskah Cetak Hanya untuk Internal*. Jakarta: Tim Model dan Outlook Jangka Panjang, Biro Riset Ekonomi, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Gouda, Frances. (1995). *Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies 1900 – 1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hobbes, Thomas. (1660). *Leviathan*. U.S.A.: Oregon State University, E-Text.
- Kartodirdjo, Sartono. (2005). *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Norton, M.B. et al. (2007). *A People and a Nation*. U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
- Poeze, Harry A. (1988). *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1897–1925*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Project Gutenberg. (t.t.). *The Federalist Papers by Alexander Hamilton, John Jay and James Madison*. E-Text.
- Moliere. (1670). *Le Bourgeois Gentilhomme*, Project Gutenberg: E-Text.
- Reich, Robert. (2000). "Wealth, Poverty and Alan Greenspan: Social Policy and Macro Economic Policy". *Public Lecture at UC – Berkeley*.
- Rivai, A. (2000). *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sen, Amartya. (2000). "Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny" dalam *Asian Development Bank: Social Development Papers*, No.1
- Wormeley, K.P. (2002). *The Lily of the Valley by Honore de Balzac*. Pennsylvania, PA: A Penn State Electronic Classics Series Publication, The Pennsylvania State University, Translation.
- Yasni, Z. (2002). *Bung Hatta Menjawab: Wawancara dengan Dr. Mohammad Hatta*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.